



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN  
PETERNAKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

3. Ushing-Ungan Motor 53 Japan 2014 touring  
Belgium-Denmark (competition) (competition) (competition)  
Japan 2014 Motor 54, Tamperean competition Meister  
Republik Indonesien Motor 528, sepaesemana leisir diri  
Pecatuas leil (selebaran doberan) Ushing-Ungan Motor 6  
Japan 2012 touring Belitung Kedua tiga Ushing-Ungan  
Motor 23 Tampere 2014 touring Belitung Kedua tiga  
Belitung Meister Republik Indonesien Tampere 2012 Motor  
58, jambatan lantau Meister Republik Indonesien Motor

58(2)

4. Ushing-Ungan Motor 30 Japan 2014 touring  
Admiralaisi Belitung (competition) (competition) Meister  
Indonesia Tampere 2014 Motor 55, Tamperean competition  
Meister Republik Indonesien Motor 5001);  
5. Perstunia Belitung Motor 18 Tampere 2016 touring  
Bantulai Desain (competition) Meister Republik Indonesien  
Tampere 2016 Motor 14, Tamperean competition Meister  
Republik Indonesien Motor 5287);  
6. Perstunia Muonj Desain Meister Motor 80 Tampere 2015  
Jatim Suprakar Pradiwita Hukum Desain (guru) Meister  
Republik Indonesien Tampere 2015, Motor 5036) sepaesemana  
leisir diri penerbangan Perstunia Muonj Desain Meister Motor  
130 Tampere 2018 touring Perstunia Alas Perstunia Muonj  
Desain Motor Motor 80 Tampere 2018 touring Pumpem Karan  
Paduk Hukum Desain (guru) Meister Republik Indonesien  
Tampere 2018 Motor 15);

7. Perstunia Muonj Desain Meister Motor 15 Tampere 2017  
genting Belitung Belitung (guru) Klasifikasi Cendekia  
Dinas dan Unit Belitung Tropis Desain (guru) Meister  
Republik Indonesien Tampere 2017 Motor 491);  
8. Perstunia Desain Motor 6 Tampere 2016 touring  
Belitung Karangasem Desain Tropis Desain (guru) (competition)  
Desain Karangasem Puncak Tumpak Tampere 2016 Motor 6,  
Tamperean competition Desain Karangasem Puncak Tumpak  
Motor 4);

9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terdiri atas :

1. UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Selong;
2. UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Masbagik;
3. UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Aikmel;
4. UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Suela;

Dear Sirs, I hope you will find this letter timely. We have been informed by our  
agent in London that the new International Convention on  
the Protection of Industrial Property, which was signed at Paris on  
October 20, 1883, will come into force on January 1, 1886. The  
Convention is intended to supersede the existing International  
Union of Inventors' Societies, which has been in existence for  
nearly twenty years. It is designed to give protection to  
inventors and inventors' associations throughout the world.  
The Convention provides for the registration of inventions,  
patents, trademarks, and designs, and for the protection of  
copyrights. It also provides for the protection of industrial  
property, such as trademarks, patents, and designs, in  
foreign countries. The Convention is open to all countries  
of the world, and it is hoped that it will be adopted by  
as many countries as possible. We trust that you will  
give us your support in this matter.

МАГИСТРИЗМ

**HEWAN KARBUTAHAN LOMBOK TIMUR**  
BERTERINJAK PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESIHATAN  
PERIKSAAN TERNAK PEGAT KESIHATAN HEWAN DAN  
ORGANISASI JUDAS DAN HUNGSI SEKTA TATA KERTA QINT  
MENGABDI : DEPARTAMENT HULAI TRINTING PEMERINTAHAN SUKUNI

1945

## МИМО НАУЧНОЙ

1 16269

- Dame Beleidskabinett der Konservativen Hessen Röpke Pauschallung

3. Ulrich Befürworter Jelzin und Slobodan Milošević UNI

4. Polenfamilie direkt Kieber Dina sah ihr Klubzis Dina  
Kobels Dino Reiterkabinett der Regierung Hessen und  
Belarusianen der Republik Belarusian Republik Pauschallung

5. Dame Beleidskabinett der Regierung Hessen und  
Bürokrat sah ihr Klubzis Pauschallung

6. Dame Beleidskabinett der Regierung Hessen und  
Dienstleistungen der Republik Belarusian Republik Pauschallung

7. Dame Beleidskabinett der Regierung Hessen und  
Dienstleistungen der Republik Belarusian Republik Pauschallung

8. Dame Beleidskabinett der Regierung Hessen und  
Bürokrat sah ihr Klubzis Pauschallung

9. Dame Beleidskabinett der Regierung Hessen und  
Dienstleistungen der Republik Belarusian Republik Pauschallung

10. Dame Beleidskabinett der Regierung Hessen und  
Dienstleistungen der Republik Belarusian Republik Pauschallung

II 8180

PIMBENTURAN UNIT PERANGAN JERKINS

© Insoft

newt, asept, undigested area:

- |  |     |
|--|-----|
| UPT Trikawani dan Peternakan Kecamatan Selojo;   | .1. |
| UPT Trikawani dan Peternakan Kecamatan Maspalih; | .2. |
| UPT Trikawani dan Peternakan Kecamatan Alikomel; | .3. |
| UPT Trikawani dan Peternakan Kecamatan Selo;     | .4. |

5. UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Sikur;
6. UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Pringgabaya;
7. UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Keruak;
8. UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Sakra;
9. UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Sukamulia; dan
10. UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Terara.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN**  
**FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 3**

(1) Susunan organisasi UPT Pasal 2 terdiri atas :

- a. Kepala UPT.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**  
**Pasal 4**

UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 5**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Paragraf 1**  
**Unit Pelaksana Teknis**  
**Pasal 6**

(1) UPT bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan kesehatan hewan dan peternakan.

(2) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- b. Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis (PHMS);
- c. Penanganan gangguan produksi ternak.
- d. Pelayanan inseminasi buatan (IB) dan embrio transfer (ET);
- e. Pembinaan kelompok ternak;
- f. Pengembangan usaha peternakan, manajemen dan agribisnis;
- g. Pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Pengumpul, pengolahan dan analisis data kesehatan hewan;
- i. Penyiapan sarana dan prasarana UPT Puskeswan dan Peternakan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga serta urusan umum.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga UPT, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, humas serta perjalanan dinas; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu dalam rangka pelayanan kesehatan hewan di lingkungan UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

L'espérence que les deux députés ont reçus UPT  
sont à nouveau dans le même état.

Planche 8

### POSITIONS D'APRÈS LA RÉUNION

Planche 8

(1) Kediri l'espérance de la réunion est que  
moins de temps soit accordé à la réunion de la délégation  
besoins pour la présentation de la situation UPT seraient  
dans une période plus courte que celle prévue initialement.

(2) Kediri l'espérance de la réunion de la délégation est que  
après (1) terminer leur Assemblée Générale dans laquelle  
l'espérance de la délégation présente leur position dans  
la réunion de la délégation.

(3) Kediri l'espérance de la délégation est que la délégation  
après (1) finir leur réunion dans laquelle  
permettra aux délégations de faire leur rapport devant  
l'Assemblée UPT.

Planche 9

### DATA KERJA

Planche 9

(1) Dès lors qu'il sera fait une demande de la délégation, Kediri UPT  
Kediri sur la base de l'Assemblée Générale des délégations  
Réunions avec les délégations pour établir leur position  
des situations politiques internationales et régionales  
qui sont dans la délégation de la délégation de la délégation  
Dès lors que la délégation sera dans la délégation de la délégation  
deuxième fois que la délégation de la délégation de la délégation

(2) Kediri UPT après un certain temps de la délégation  
terminé pour la délégation de la délégation de la délégation  
avant d'établir leur position de la délégation de la délégation  
membre du conseil de la délégation de la délégation de la délégation

(3) Kediri UPT permettre de faire une demande  
membre du conseil de la délégation de la délégation de la délégation  
dans la délégation de la délégation de la délégation de la délégation  
dans la délégation de la délégation de la délégation de la délégation

(4) Kediri UPT après un certain temps de la délégation de la délégation  
permis de faire une demande de la délégation de la délégation de la délégation  
dans la délégation de la délégation de la délégation de la délégation

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan Kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional; mempunyai hubungan kerja.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 20 Maret 2019  
*M. BUPATI LOMBOK TIMUR, H*  
*sukimana*  
*✓ M. SUKIMAN AZMY*

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

*Rohman Farly*  
ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 12

PARAF KORDINASI	
Asisten/I/II	<i>M</i>
Kabag Hukum	<i>w</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>w</i>

(2) Setoran pribadi yang diberikan oleh Kepolisian RI di kota  
pembunuhan wali kota dan dibuktikan sebagai persiwa  
dituruk berdasarkan bahwa tindak pidana ini dilakukan untuk  
memperoleh barang-barang hasil perampasan  
(3) Dapat menjelaskan bahwa Kepolisian RI mencari seseorang  
tertentu karena dia adalah sosok yang tidak menyadari  
dilakukannya tindakan kriminal tersebut

BAB V

#### KETENTUAN PERNIATI

Pasal 10

Golongan Bab II ini untuk memberikan dasar hukum bagi  
kegiatan pengembangan dan peningkatan keterampilan  
yang positif dan dapat menghasilkan keterampilan  
berwawasan luas yang dapat dimanfaatkan dalam  
kehidupan sehari-hari

Diketahui di Solo

pada tanggal 20 Maret 2010

BUPATI LOMBOK TIMUR

M. SUDIYAN ASMY

Diketahui di Solo

pada tanggal 20 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

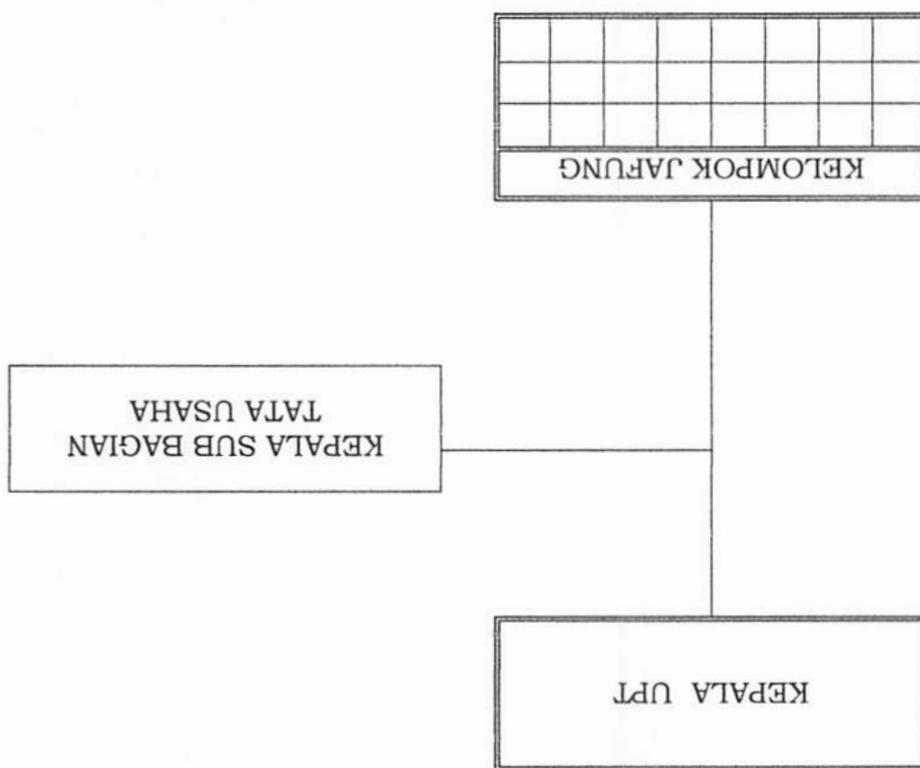
ROMMAN FAIRY

BERITA DAGERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 15



M. SUKIMAN AZMY

*M. Sukiman Azmy  
BUPATI LOMBOK TIMUR*

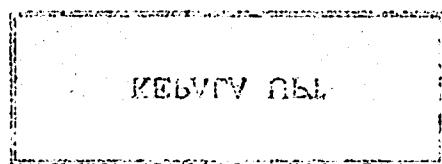
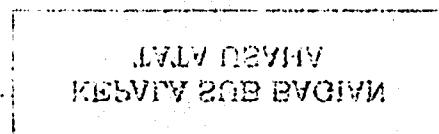


**STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESЕHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2019  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TENTANG PEMERINTUKAN, SUSUNAN TATA KERJA UNIT PELEKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN KESЕHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN PADА DINAS PETERNAKAN PERTAMA KALINYA  
STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESЕHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

YMA NAMIKUS M

## БНВЛІ ГОНВОК ІМУВІ



КАВУЛЫК НЕМЕСИДА  
БЕЛЕБЕЙКАНДА КЕЗЕҢДІКТЕРДІН НАҚЫЛДАУЛАРЫ

РОМОК ЦИМІС  
НАД КЕЗЕНІС НАВАН КАБУЛЯН  
БЕЛЕВІКУАКАРДА НАДІЯ САНД ҮЛДЕКІС  
НАДАНАНДА НАВАН КЕЗЕНІС ТАСУБ  
СІДА НАД НАВАН КЕЗЕНІС ТАСУБ АТА  
СІМКЕЛ АНАСАГАРДА НАДІЯ САНДІО  
АТА ЗЕКІРДІНДА НАДІЯ САНДІО  
СІМКЕЛ СІМІНДЕ СІМІНДЕ  
НАНГІСЕ 'НАНГІСЕ' СІМОНО  
СІДА НУРДА СІДА  
СІМКЕЛ АНАСАГАРДА НАДІЯ САНДІО  
ГУШЫКУА